

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi ini membahas tentang dampak kebijakan Jepang *Free and Open Indo-Pacific* terhadap dinamika di kawasan Asia Tenggara. Dimana, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat diuntungkan oleh letaknya yang strategis. Posisi Asia Tenggara tepat di persimpangan antara konsentrasi industri, teknologi dan kekuatan militer di Asia Timur laut ke utara, sub-kontinental dan sumber-sumber minyak di Timur Tengah ke timur, dan Australia ke selatan (Triwahyuni, 2011). Asia Tenggara juga merupakan salah satu kawasan yang mempengaruhi Jepang yang mana merupakan kawasan negara-negara yang sedang berkembang, sehingga merupakan pasaran potensial bagi Jepang. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara merupakan pemasok bahan mentah untuk kepentingan produksi dan sekaligus menjadi pasaran bagi produk Jepang karena negara-negara tersebut memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan oleh Jepang. Kawasan Asia Tenggara memiliki lokasi geografis yang strategis yang merupakan lintas perdagangan Jepang, karena itu Asia Tenggara merupakan kunci lintas perdagangan bagi Jepang.

Berakhirnya Perang Dingin ini sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara yang sebelumnya merupakan kawasan yang diperebutkan oleh kedua negara adidaya, walaupun setelah berakhirnya Perang Dingin tersebut tetap ada upaya memperoleh hegemoni di kawasan ini, setelah salah satu negara adidaya tersebut runtuh. Menurunnya hegemoni di kawasan Asia Tenggara menyebabkan ketidakstabilan karena tidak adanya lagi kekuatan penyangga kestabilan untuk menjaga keamanan Asia Tenggara, sehingga kestabilan ini menarik negara-negara lain yang mempunyai kepentingan di kawasan ini adalah Jepang dengan kekuatan ekonomi yang dimilikinya (Saga, 2011).

Melihat hal tersebut, Asia Tenggara mengalami ancaman terhadap stabilitas kawasannya yang mana ditandai munculnya ancaman terorisme yang telah menjadi persoalan serius yang harus dihadapi oleh negara-negara di kawasan. Selain itu, modernisasi dan globalisasi sedikit banyak telah mempengaruhi *nature of terrorism* menjadi lebih kompleks dan rumit. Kelompok-kelompok teroris tidak lagi bergerak dalam sebuah situasi isolasi. Ruang dan peluang yang dimiliki oleh kelompok teroris untuk menjalankan aksinya semakin luas. Hal

ini menjadikan fenomena terorisme menjadi relatif sulit diprediksikan untuk menentukan kapan dan di mana kelompok teroris akan melakukan aksinya (A'raf, 2015)

Pada tahun 1997 Jepang mulai menjalin hubungan dengan Asia Tenggara pada saat masa pemerintahan Perdana Menteri Takeo Fukuda. Dalam hal tersebut, hingga saat ini Jepang merupakan mitra dagang terbesar keempat di Asia Tenggara, sumber kedua investasi asing langsung dan sebagai tatanan regional yang berdasarkan aturan (Choong, 2020).

Kemudian, setelah kekalahan telak pada Perang Dunia II, Jepang merupakan salah satu negara dengan historis panjang dalam isu keamanan internasional (Hery Irawan, 2021). Semenjak itu, Amerika Serikat mulai menguasai militer Jepang melalui kerjasama tepatnya pada tanggal 8 September 1951. Dimana, Jepang menandai Perjanjian San Fransisco (*Treaty of San Fransisco*) yang berisi pernyataan secara resmi bahwasanya Jepang menyatakan kekalahannya (Syahrin, 2018). Namun, pada tahun 1960-1965 Jepang mulai menunjukkan perubahan internalnya terutama pada bidang ekonomi. Peningkatan inilah yang kemudian menjadi salah satu jalan bagi Jepang untuk bisa menghadirkan kekuatan militernya. Pada tahun tersebut Jepang mulai membangun alat pertahanan untuk melindungi diri dari ancaman bangsa lain (Teguh Prasetyo, 2015).

Setelah berakhirnya Perang Dunia II Jepang kembali mengkaji dan meningkatkan kebijakan pertahanannya yakni dengan adanya *Japan Self Defense Force*. Dimana, kebijakan tersebut tidak hanya untuk menjaga perdamaian di area konflik saja. Akan tetapi, di area non-konflik pun juga ikut diambil alih dalam tugas *Japan Self Defense Force*. Namun, selain *Japan Self Defense Force*, Jepang juga meningkatkan kebijakan pertahanan yang lainnya. Seperti, adanya peningkatan status kelembagaan pada 9 Januari 2007 dari JDA (*Japan Defense Agency*) menjadi (*Ministry of Defense*). Peningkatan status kelembagaan tersebut juga bertujuan untuk meminimalisir dinamika yang terjadi di kawasan Asia Timur. Akan tetapi, diantara kebijakan tersebut masih kurang efektif dalam menghadapi dinamika yang terjadi di kawasan sendiri. Dimana, konflik antar negara di kawasan masih terjadi dikarenakan permasalahan perebutan wilayah yang mana antara Jepang dan China sengketa pulau (Senkaku/Diayou) serta Jepang dan Korea sengketa pulau (Takhesima/Dokdo). (Wulandari Dewi 2014, 32-35).

Pada tahun 2016 Jepang mengeluarkan kebijakan pertahanannya yakni *Free Open Indo-Pacific*. FOIP sendiri merupakan strategi yang ditujukan khusus untuk Indo-Pasifik dari negara-negara yang mempunyai keinginan yang sama di kawasan. FOIP ini dikembangkan melalui kerjasama antara Jepang dan Amerika Serikat. FOIP dikeluarkan pada 27 Agustus 2016,

di Kenya oleh Shinzo Abe yang menjadi Perdana Menteri Jepang dari tahun 2012-2020. *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) sendiri merupakan kebijakan Jepang yang berupaya menyebarluaskan dan menetapkan prinsip-prinsip inti untuk tatanan kawasan agar patuh terhadap supremasi hukum, kebebasan navigasi dan penerbangan serta tidak ada jalan lain untuk menggunakan kekuatan. (Choong William, 2020, pp.1-2)

Pada saat pembukaan TICAD VI (*Tokyo International Conference on African Development*) yang keenam. *Free and Open Indo-Pacific* FOIP membahas terkait perdebatan yang lebih luas mengenai tatanan regional Indo-Pasifik di masa yang akan datang. Dimana, bertujuan untuk menjaga tatanan kawasan yang ada berdasarkan keunggulan Amerika Serikat dengan menyesuaikan kembali keseimbangan strategis kawasan. Selain itu, FOIP ini juga bertujuan untuk memastikan komitmen berkelanjutan Amerika terhadap kawasan, untuk memeriksa dan menyeimbangkan pengaruh China yang berkembang dan untuk saling mememberdayakan ASEAN, Australia dan India melalui pembangunan koalisi dan dukungan pembangunan kapasitas.

Sesuai dengan namanya, FOIP merupakan gabungan dengan konsep geografis yakni “indo-pasifik”. Dimana, nomenklatur yang semakin banyak digunakan oleh para diplomat, pembuat kebijakan dan cendekiawan di banyak bagian dunia untuk menunjukkan zona yang koheren secara spasial yang mana menggabungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Perdana Menteri Shinzo Abe sendiri mengumumkan dan menjelaskan tentang FOIP terutama sebagai serangkaian inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan kemakmuran ekonomi Jepang. Kemakmuran ekonomi tersebut dengan mempertahankan tatanan berbasis aturan dan meningkatkan konektivitas diseluruh perairan, pulau dan negara yang luas. Sementara pemerintah Jepang sendiri telah merinci beberapa elemen dalam agenda FOIP. Seperti, bidang pembangunan luar negeri, inisiatif khusus untuk proyek infrastruktur skala besar diberbagai lokasi yang membentang dari Pasifik hingga Afrika Timur. (Rossister Ash, 2018, pp.1-2).

B. Rumusan Masalah

Seperti yang sudah dijelaskan dalam latar belakang diatas terkait kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Jepang dalam dinamika di kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, dari pemaparan tersebut dapat diambil sebuah pokok permasalahan terkait permasalahan yang akan diangkat, yakni : **“Bagaimana dampak Kebijakan Jepang *Free Open Indo-Pacific* (FOIP) terhadap Dinamika Keamanan di Kawasan Asia Tenggara?”**

C. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Kebijakan Luar negeri

Teori kebijakan luar negeri merupakan sebuah teori yang dapat dijadikan kacamata untuk menjelaskan alasan sebuah negara dalam mengeluarkan kebijakan. Kebijakan luar negeri memiliki beberapa definisi dari para pakar. Pendefinisian tersebut meliputi sebuah keputusan yang diambil oleh negara dengan mempertimbangkan tuntutan dari kondisi politik domestik serta kemampuan negara dalam dalam dua aspek lain yakni ekonomi dan militer(Kasmir,2003). Salah satu tokoh yang mengembangkan studi dari teori kebijakan luar negeri adalah William D. Coplin. Coplin melalui tulisan dalam bukunya menjabarkan teori kebijakan Luar Negeri yaitu (Coplin,1992,p50):“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri”.

Selain Coplin, terdapat tokoh lain yang mengembangkan teori kebijakan luar negeri yakni Rosenau. Dimana, ia menjabarkan bahwasanya terdapat tiga aspek untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri menjelaskan hubungan suatu negara dengan negara lainnya (Rosenau, 1972). Pertama adalah kebijakan luar negeri sebagai serangkaian orientasi (*as a cluster of orientation*) yang artinya adalah sebagai pedoman untuk pembuat kebijakan luar negeri dalam merumuskan kebijakan luar negeri dengan menyesuaikan kondisi eksternalnya yang berdasarkan orientasi yang ada. Orientasi yang dimaksud disini adalah dapat dilihat dari persepsi, nilai-nilai berdasarkan sejarah masa lampau dan sikap atau perilaku.

Kedua adalah sebagai serangkaian komitmen dan rencana untuk melakukan suatu tindakan (*as a set of comitments to and plan for action*). Hal tersebut merujuk pada perumus kebijakan luar negeri yang berusaha untuk menjaga kondisi eksternal dalam sistem internasional untuk terus sesuai dengan orientasi kebijakan luar negeri yang sudah diterapkan. Hal ini dirancang dalam rangka komitmen rencana dalam kebijakan luar negeri. Rencana yang disusun ini juga perlu memperhatikan kondisi internal negara tersebut. Maka dari itu, Ketika kondisi internal mampu mendukung perumusan kebijakan luar negeri tersebut, maka tujuan

yang ingin dicapai dalam sistem internasional akan lebih mudah untuk tercapai. Selain itu, dalam rencana tersebut juga melibatkan sekumpulan metode yang mampu merespon tantangan dan peluang dari luar negeri.

Kemudian, yang terakhir adalah sebagai model aksi (*as a form of behaviour*). Dimana, kebijakan luar negeri tidak hanya membahas mengenai perumusannya saja. Melainkan telah memasuki tahap bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut. Bagaimana implementasi kebijakan luar negeri tersebut merespon terhadap kondisi eksternal dalam sistem internasional. Sehingga negara melalui kebijakan luar negerinya dapat berinteraksi dengan negara lain dan bagaimana kebijakan luar negeri tersebut bekerja dalam mempengaruhi hubungan antar negara. Selain itu juga dapat menentukan posisi atau status negara dalam sistem internasional. Implementasi kebijakan luar negeri tersebut tentu saja berlandaskan orientasi negara tersebut dengan didasarkan oleh komitmen dan rencananya yang telah ditentukan.

Kemudian jika merujuk pada K.J Holsti (1992) aktor dalam hubungan internasional, khususnya negara melakukan berbagai macam kerjasama yang terdiri atas kerjasama bilateral, trilateral, multilateral, hingga regional. Hal ini tidak terlepas karena kebijakan luar negeri menjadi tindakan atau aksi suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial budaya, serta militer. Dalam menjalankan kebijakan luar negeri tersebut, banyak cara yang dilakukan oleh suatu negara, namun cara-cara seperti perdamaian, perang, dan kerjasama ekonomi menjadi cara yang paling sering dilakukan.

2. Teori Keamanan Regional Kompleks (*Regional Security Complex Theory*)

Teori keamanan regional (sebagaimana diciptakan dan dikonsepsikan oleh Buzan) dapat didefinisikan sebagai satu set unit yang proses utamanya adalah sekuritisasi, desekuritisasi atau keduanya saling terkait sehingga masalah keamanannya tidak dapat dianalisis atau diselesaikan secara wajar satu sama lain. Dalam hal ini, Buzan berpendapat bahwa dalam kerangka RSC, “wilayah tidak diberikan oleh geografi atau budaya atau pola peristiwa terkini, atau keinginan analisis, wacana lokal tentang regionalisme. *Regional Security Complex* dibangun secara sosial oleh anggotanya baik secara sadar atau tidak sadar dengan cara di mana proses desekuritisasi mereka saling terkait satu sama lain. Akan tetapi, walaupun RSC mungkin dapat bertahan lama tapi RSC sendiri tidak permanen. Oleh karena itu, mereka dapat di ubah oleh perubahan dalam proses tersebut. Meskipun, ruang lingkup perubahan dapat dikondisikan

oleh kedalaman dan kedangkalan yang relatif dari cara struktur sosial keamanan yang diinternalisasikan oleh para aktor yang terlibat.

Kemudian, konseptualisasi dalam *Regional Security Complex Theory* terhadap pembangunan kawasan telah menjadi proses yang lambat sejak Perang Dunia II. Namun, adanya persaingan dalam Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki dampak yang kuat dari proses tersebut. Kemampuan negara-negara tersebut untuk memproyeksikan kekuasaan dan mencampuri dinamika negara lain pada dasarnya membekukan perkembangan regional di berbagai bidang. Hal tersebut dikarenakan, untuk menunda munculnya dinamika lokal. Pada tahun 1990-an konfigurasi struktural dunia mulai muncul di sepanjang garis regional dan selanjutnya difasilitasi oleh percepatan regionalisme dan munculnya aktor non-militer.

Konsep RSC sendiri mewakili perspektif baru dalam hubungan internasional, konsep tersebut telah berkembang agar lebih sesuai dengan evolusi lingkungan keamanan kontemporer itu sendiri. Dimana “secara tradisional, RSC biasanya dihasilkan oleh proses *bottom-up* (atau dalam ke luar) yang ketakutan dan kekhawatiran yang dihasilkan di dalam kawasan menghasilkan RSC.” Namun, mengingat realitas ancaman keamanan 'baru' kawasan dapat dibuat sebagai pola dalam proses tingkat sistem. Contoh yang ditawarkan di sini adalah bahwa sekelompok negara menemukan sendiri berbagi efek lokal dari perubahan iklim adalah kasus tanggapan kolektif terhadap nasib bersama yang timbul dari tekanan sistemik luar. Sementara sifat sistemik dari ancaman dapat membuatnya tampak sebagai ancaman sistem global. RSC masih dibentuk oleh aktor regional karena merekalah yang mendefinisikan masalah dalam istilah tersebut dan berinteraksi untuk menghasilkan formasi regional atas masalah tersebut.

Dalam *Regional Security Complex* terdapat struktur esensial yang terdiri dari empat elemen yakni batas, struktur anarki, polaritas dan konstruksi sosial. Dengan keempat elemen ini dapat membedakan garis-garis kompleks dan dapat dicirikan sebagai berikut:

1. Batas – Apakah ada Batasan yang jelas yang dapat membedakan anggota satu kompleks dari yang lain?

Seperti yang telah dikemukakan oleh Buzan dan Waever, RSC merangkum dinamika yang berbeda antara satu negara tertentu dalam konteks geopolitik. Keberadaan RSC dilihat oleh perbedaan yang jelas anatara unit-unit didalam kompleks

dan unit-unit diluarnya. Akibatnya, hubungan antar negara didalam kompleks tersebut diintensikan oleh unsur keakraban dan afinitas. Oleh karena itu, penting bahwa ada batasan yang jelas. Sehingga faktor-faktor lokal diberi bobot yang tepat dalam analisis keamanan.

2. Struktur Anarki – Apakah ada dua atau lebih unit otonom didalam kompleks?

Variabel struktural anarki dalam hal ini jelas dan lugas. Diamana, hal tersebut agar subsistem regional dengan batas yang jelas muncul, sangat penting bahwa mayoritas unitnya adalah otonom. Tanpa adanya otonomi seperti itu, dinamika daerah yang khas gagal muncul karena daerah tersebut mudah ditembus dan dipengaruhi oleh kekuatan luar.

3. Polaritas – Apakah ada distribusi daya antar unit?

Seperti yang dikemukakan oleh Buzan dan Waever, “struktur anarki, struktur esensial dan karakter RSC ditentukan oleh dua jenis hubungan, hubungan kekuasaan dan pola persahabatan dan permusuhan.”Sebuah RSC mewakili substruktur dari sistem internasional, dan dengan cara yang sama, menggabungkan dinamika yang berbeda yang keamanannya dapat difasilitasi atau dihalangi oleh distribusi kekuatan di dalam. Tingkat regional “dapat dianalisis dalam hal polaritas, mulai dari unipolar, melalui bi – dan tripolar, hingga multipolar” dan penting untuk dibedakan dari polaritas tingkat global. Interaksi historis antar negara adalah penting dan “dengan demikian tidak cukup hanya melihat distribusi kekuasaan untuk memprediksi pola konflik sejarah kebencian dan persahabatan, serta isu-isu spesifik memicu konflik atau kerjasama, dan mengambil bagian dalam pembentukan konstelasi keamanan keseluruhan dari ketakutan, ancaman, dan persahabatan yang mendefinisikan RSC.

4. Konstruksi Sosial – Apakah ada pola persahabatan dan permusuhan?

Pola persahabatan dan permusuhan jauh lebih sedikit bagian dari teori HI tradisional daripada kekuasaan, melainkan mewakili elemen yang telah muncul sebagai produk dari kepadatan interaksi regional. Pola-pola ini menyoroti interaksi antara negara bagian dalam konteks regional tertentu dan menempatkan sifat interaksi ini pada spektrum antara persahabatan dan permusuhan. Pola-pola ini cenderung menunjukkan hubungan seperti apa yang mendominasi sistem – baik itu teman, saingan, atau musuh – dan “dipengaruhi oleh berbagai faktor latar belakang seperti sejarah, budaya, agama,

geografi, tetapi sebagian besar keduanya adalah jalur. Bergantung dan ini menjadi penjelasan terbaik mereka.”Kekuasaan, meskipun masih diperlukan, tidak cukup sebagai indikasi subsistem yang koheren secara regional. Sementara distribusi kekuasaan di dalam kompleks keamanan berkontribusi untuk membentuk kemungkinan penyelarasan; namun tidak membentuk keseluruhan karakter daerah.

Oleh karena itu, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa struktur esensial dari RRC sendiri dapat diturunkan kedalam empat variable yakni, batas, struktur anarki, polaritas dan konstruksi sosial. Selain itu, karakterisasi parameter RSC memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi di mana kompleks berada pada spektrum dari pembentukan konflik, hingga rezim keamanan atau komunitas keamanan dan apa yang dapat dijelaskan tentang dinamika regional itu sendiri. Kelebihan RSC, seperti yang disarankan Buzan, adalah bahwa RSC “tetap lebih sempit dengan keamanan dan aktivitas yang ditentukan keamanan, dan menggunakan RSC sebagai instrumen umum untuk menceritakan versi terstruktur dari sejarah dunia, masa lalu, sekarang, dan masa depan.” Kekuatan RSC bertumpu pada fakta bahwa "diizinkan untuk menentukan urutan yang mungkin di sisi hasil dan untuk memilih parameter yang relevan di sisi input," yang, pada gilirannya, menghilangkan analisis variabel ad hoc yang longgar dan, dengan demikian, menunjukkan kebaikan dan keterbatasannya (Curden, 2011)

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori yang dipakai, penulis dapat mengambil hipotesis bahwa dampak kebijakan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) tahun 2016 terhadap kawasan Asia tenggara adalah Keamanan maritim di Asia Tenggara lebih terjaga karena hadirnya Pasukan Bela Diri Jepang atau *Self Defense Force* (SDF) dan Kebebasan navigasi dan udara diatas Laut China Selatan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mendeskripsikan kebijakan pertahanan Jepang *Free and Open Indo-Pacific*.
2. Agar mampu memahami dan menganalisa kebijakan pertahanan Jepang *Free and Open Indo-Pacific* terhadap dinamika kewanaman di kawasan Asia Tenggara dan Timur.

F. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat penelitian prediktif (*predictive research*). Dimana, ditujukan untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi atau berlangsung pada saat yang akan datang berdasarkan hasil analisis keadaan saat ini. Kemudian, teknik pengumpulan datanya menggunakan *library research* dengan memanfaatkan data-data sekunder yang didapatkan melalui perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik dan website yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. Data yang didapatkan telah diolah dan diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa serta simpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti. (Sudaryono, 2016).

G. Jangkauan Penelitian

Agar tidak memiliki pembahasan yang melebar atau menyimpang dari judul terfokus pada inti permasalahan sehingga penelitian dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Penulis menetapkan batasan tulisan hanya pada tahun 2016 dikarenakan tahun tersebut merupakan pembentukan dari kebijakan pertahanan Jepang yakni *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP).

H. Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini untuk menjadi karya ilmiah, penulis membagi pembahasan ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun jumlah bab terdiri dari 4 bab dengan sistematika berikut :

BAB 1 berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, tujuan penelitian, metodologi penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan

BAB 2 Dalam bab II akan menjelaskan mengenai kebijakan pertahanan Jepang *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) Jepang era PM Shinzo Abe.

BAB 3 Dalam bab III menjelaskan tentang bagaimana dampak kebijakan *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) terhadap dinamika keamanan di kawasan Asia Tenggara

BAB 4 mengenai kesimpulan.